

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) pengertian mengenai desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis dalam peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah (Indira, 2014; Suwarno, 2012). Pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung dari kesiapan pemerintah dalam upaya menata sistem pemerintahannya agar pembangunan berjalan secara efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.). Komitmen ini kemudian diwujudkan dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi dan kewenangan kepada desa untuk membuat kebijakan-kebijakan, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri (Joeliono,1998). Berlakunya undang-undang tersebut menjadikan desa sebagai subyek dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan sehingga pemerintah desa dapat menentukan arah dan tujuan pembangunan berdasarkan pada potensi lokal yang dimilikinya.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan pesaing global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti pada

program Alokasi Dana Desa (ADD) yang pelaksanaannya masih mendapatkan banyak hambatan, seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Saputra, 2013; Sumiati, 2015).

Selain ADD, program yang saat ini tengah digiatkan oleh pemerintah pusat adalah program Dana Desa (DD). Di program ini, penguatan otonomi desa dilakukan melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dan dikelola oleh masyarakat desa sendiri (Nyimas, 2016; Suharyanto & Sofianto, 2012). Sesuai cara program ini didasarkan atas pola bottom up yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan serta memberikan kewenangan desa untuk menentukan sendiri sasaran pembangunan yang mereka inginkan.

Selain peran serta partisipasi masyarakat, SDM aparatur desa, organisasi desa dan masyarakat merupakan salah satu faktor dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini dapat berpengaruh dalam perencanaan kemudian berimbas pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Pada permasalahan tersebut, dalam penyelesaian masalah ini diperlukan kerjasama dan peran semua pihak dalam penanggulangan permasalahan yang disebabkan oleh ke tidak siapan desa dalam mengelola anggaran dana desa. Selain itu, kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa juga merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menjadikan desa menjadi sejahtera.

Sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, harapan yang ingin dicapai desa adalah memajukan desa yang mandiri dan demokratis sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk melaksanakan

tujuan yang ingin dicapai desa, peran pemerintah desa sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas suatu desa.

Masyarakat menjadi komponen penting untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hambatan yang dapat menjadi batu sandungan bagi pengelolaan dana desa tersebut. Pemahaman, kesadaran, partisipasi masyarakat merupakan kendala utama dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Desa Kalisidi Kabupaten Semarang. Secara umum pelaksanaan program dana desa masih belum melibatkan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa; Studi Kasus Di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa Kalisidi, serta bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Kalisidi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa kalisidi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan dan pemanfaatan dana desa Kalisidi
- Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa Kalisidi
- Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Kalisidi dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa Kalisidi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam menambah wawasan, khususnya dalam penerapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di daerah-daerah lain. Konsep hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan di bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten maupun Desa diseluruh Indonesia. Sehingga dapat menjadi refrensi dalam keberhasilan penerapan program kedepannya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dengan turun secara langsung serta memberikan pengalaman kepada peneliti sehingga dapat menambah kemampuan dan ketrampilan peneliti. Dengan turun secara langsung ke lokasi penelitian, dapat menambah wawasan belajar peneliti karena dengan ini, peneliti akan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman dari setiap proses penelitian yang dilakukan dilapangan dalam rangka memperoleh data.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat umum terhadap pentingnya partisipasi mereka terhadap keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hal ini akan membuat

masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka juga penting demi keberhasilan keberlangsungan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.

1.5 Tinjauan Literatur

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan beberapa teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan kepustakaan dalam kajian “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kalisidi Kabupaten Semarang”, ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang penulis teliti. Hal-hal yang akan ditekankan pada penelitian terdahulu, meliputi: metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, konsep yang digunakan, antara lain:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Upaya Pengurangan Angka Kemiskinan di Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo – Nurul Kurniawati (2019), penelitian ini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pemanfaatan halaman pekarangan di Desa Wulungsari, dan menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Wulungsari dalam pemanfaatan lahan pekarangan, serta dampak dari adanya partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Desa Wulungsari.
2. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2017 – (2019), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan dan penetapan program dan kegiatan dana desa di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, juga menganalisis pengawasan penggunaan dana desa di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

1.5.2 Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal (Adisasmita, 2006:34). Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam

implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan (Adisasmita, 2006:35).

Menurut Diana Conyers (1991:154-155), ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek di negara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat akan sulit diharapkan apabila mereka tidak diikutsertakan. Alasan ketiga, partisipasi menjadi urgent karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan maupun pemberdayaan sangat diperlukan, karena nantinya masyarakat itu sendiri yang akan menjalankan pembangunan maupun pemberdayaan itu sendiri. Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka untuk memiliki rasa tanggungjawab terhadap keberlanjutan program pembangunan maupun pemberdayaan, dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreatifitas masyarakat dapat lebih maksimal.

Partisipasi pada hakekatnya merupakan bentuk peningkatan tawar-menawar harga, sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik kapital. Partisipasi masyarakat secara aktif juga dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga yang terjadi adalah sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah, dan sumber daya modal dari investor luar (suparjan & hempri, 2003:54). Adanya partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan agar jangan sampai proses pembangunan yang dilakukan ataupun masuknya investor dari luar justru meminggirkan peran ekonomi masyarakat lokal (suparja & henri, 2003:55). Berkaitan dengan hal ini maka diperlukan adanya regulasi-regulasi dari pemerintah yang memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal. Perlindungan yang dimaksud disini meliputi kearifan lokal, tradisi-tradisi lokal, maupun potensi-potensi lokal yang sebenarnya dapat dijadikan modal sosial pembangunan.

Yujin C Erickson (1974. Dalam suparjan & henri, 2003:58-60), mengungkapkan lebih jelas mengenai konsep partisipasi, Partisipasi pada dasarnya mencakup 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki pada komunitas (sense of belonging to the life people). Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam labelling un identity (pelabelan pada identitas mereka), sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar, dari pemikiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggungjawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar (contohnya: hubungan dengan pemerintah ataupun dengan komunitas masyarakat lainnya). Pada partisipasi ini masyarakat hendaknya perlu dilibatkan pada proses pembangunan, yaitu (1) Identifikasi masalah dimana masyarakat bersama dengan perencana ataupun

pemegang kebijakan otoritas tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, brain storming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan. (2) Proses perencanaan dimana masyarakat dilibatkan identifikasi (3) Pelaksanaan proyek pembangunan (4) Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (kemanfaatan bagi masyarakat) atautkah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti proses dari evaluasi ini. (5) Mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negative pembangunan dan (6) monitoring, tahap yang dapat dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan, dalam tahap ini juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Menurut Hamijoyo (2007:04) Ada beberapa bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usah-usaha pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b. Partisipasi harta benda adalah partisipasin dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- c. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usah-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d. Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui ketrampilanyang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Warga masyarakat yang mampu memberikan bantuan program pembangunan dalam jumlah yang besar berarti dia telah berpartisipasi secara aktif dan menyukseskan jalannya pembangunan. Demikian juga mengartikan partisipasi dalam bentuk non materi, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah (suparjan &hendri 2003: 69).

Istilah partisipasi bukan sekadar retorika semata, tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

1.5.3 Konsep Partisipasi

1.5.3.1 Penumbuhan Partisipasi

Diana Conyers (1991: 154-155) menyatakan bahwa terdapat 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat amat penting. Alasan tersebut ialah :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa adanya ini maka program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

3. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri, yaitu masyarakat mempunyai hak dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka.

Pandangan Conyers ini dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pendapat ini apabila dihubungkan dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dapat diperoleh pemahaman bahwa partisipasi masyarakat yang baik bukan hanya sekedar dilihat dari kehadirannya. Dalam kehadiran mereka tersebut dapat memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat melalui usulan-usulan yang diajukannya dan permasalahan masyarakat di lingkungannya. Di sisi lain, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam persiapan dan perencanaan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, sekaligus mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menggunakan hak-hak demokrasi seperti hadir dalam pengambilan keputusan dan berbicara dalam Musrenbangdes. Persoalannya adalah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang makin menurun.

1.5.3.2 Bentuk Partisipasi

Telah disinggung sebelumnya bahwa secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam proses pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok, atau masyarakat dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya dapat menunjang keberhasilan dari sebuah proyek pembangunan.

Bentuk-bentuk partisipasi menurut Ndraha (1990:103-104) mengemukakan beberapa bentuk atau tahap partisipasi, yaitu:

1.) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.

2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengabaikan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan (penetapan rencana).
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, dan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5.4 Konsep Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi masyarakat adalah:

Sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan yang dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut Adisasmita (2006: 34) mengemukakan bahwa :

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat besar terkait dengan pembangunan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka program yang dilakukan akan sesuai dengan kegiatan perencanaan. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesiapan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat. Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat top-down, partisipasi masyarakat dalam kebijakankebijakan yang di buat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang bottom-up, tingginya

partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan di usahakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, berarti saat penyusunan rencana atau program pembangunan dilakukan secara penentuan prioritas, dengan demikian implementasi program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal.

1.5.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Menurut Slamet (Suryono 2001: 124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai: *“ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil*

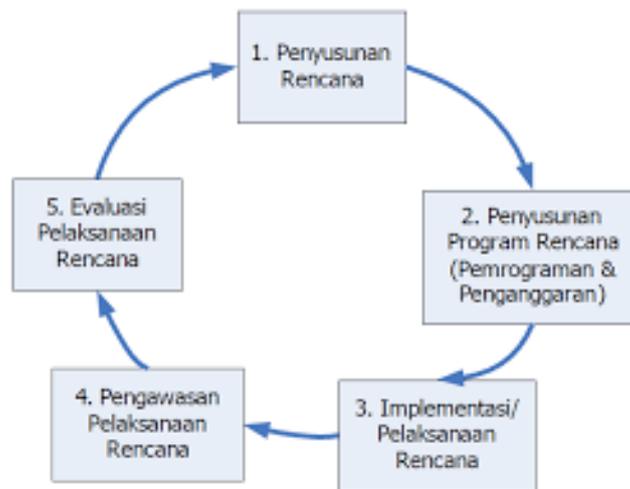
pembangunan”. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Bratakusumah (2005: 16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat. Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan (belum tentu dengan cara-cara langsung) kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. Menurut Tjikroamidjojo (1995: 224) ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menemukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyataa konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.

4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

1.5.6 Kerangka Konsep

Gambra 1.1
Kerangka Konsep



1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang. Lokasi penelitian tersebut ditetapkan karena beberapa pertimbangan, pertama, lokasi ini merupakan salah satu desa yang memperoleh dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan pedesaan. Adapun sasaran penelitian yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang. Untuk mendapatkan tambahan data, maka penelitian ini menetapkan beberapa orang sebagai informan pendukung, yaitu Aparat desa/dusun dan kecamatan, serta masyarakat sekitar.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa indepth interview, participant observation dan documentation (Moleong, 1991). Metode Participatory Poverty Assessment (PPA) dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menampung aspirasi

masyarakat dan stakeholder lain. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan aksi-aksi yang berkelanjutan. Teknik Pengolahan dan Analisis Data dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kalisidi Kabupaten Semarang (Asma Luthfi, Hartati Sulistyono Rini, Fulia Aji Gustaman, Thriwaty Arsal, Totok Rochana, 123) penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sementara proses analisisnya menggunakan model analisis interaktif yang melalui proses berikut: data yang terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, disajikan, dideskripsikan dan kemudian diberi pemaknaan dengan interpretasi logis. Aktivitas ketiga komponen tersebut berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang benar. Apabila kesimpulan kurang memadai, maka diperlukan kegiatan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari data lagi di lapangan dan mencoba menginterpretasikannya dengan fokus yang lebih terarah. Dengan demikian aktivitas analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan proses siklus sampai penelitian selesai.